

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana mahasiswa Papua memaknai *Free Papua Movement* atau gerakan Papua Merdeka melalui pengalaman emosional yang diekspresikan dalam komunitas mahasiswa dan media sosial. Pemilihan mahasiswa Papua sebagai subjek penelitian didasarkan pada tingkat kesadaran kritis mereka terhadap isu sosial dan politik yang berkaitan dengan gerakan *Free Papua Movement* (FPM). Aktivitas dalam komunitas mahasiswa seperti diskusi atau aksi damai menjadi sarana komunikasi kolektif yang memungkinkan terjadinya proses berbagi pengalaman emosional, refleksi identitas, dan pembentukan makna bersama terkait isu Papua dan FPM. Selain itu, keterlibatan mahasiswa Papua di media digital menunjukkan bagaimana pesan-pesan emosional mengenai FPM dikonstruksi, disampaikan dan dinegosiasikan kepada publik. Proses ini sejalan dengan konsep utama dalam *emotional message* (Bartsch & Hübner, 2005) yang menekankan bahwa komunikasi bukan sekadar pertukaran informasi, melainkan juga pertukaran emosi yang saling memengaruhi individu dan kelompok.

Emosi sering kali bersifat adaptif; artinya, mereka dapat membantu seseorang menyesuaikan diri dengan situasi (DeVito, 2016, p. 198). Dalam hal ini, tidak hanya masyarakat Papua yang melihat adanya ketidakadilan sosial dan

kesenjangan di masyarakat. Isu-isu di Papua banyak diperbincangkan dan disuarakan bukan hanya domestik namun juga di kancah internasional. The International Coalition for Papua (ICP) pada 2020 mengeluarkan pernyataan yang merekomendasikan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menghormati kebebasan berserikat dan berkumpul, serta kebebasan menyatakan pendapat politik secara damai. Apalagi jika pendapat tersebut berbeda dengan ideologi negara kesatuan. Yang mana secara eksplisit menyampaikan dukungan mereka terhadap gerakan Papua Merdeka (Rosyidin et al., 2022, pp. 294–295). Selain itu terdapat pula komunitas internasional lainnya yang mendukung hak asasi masyarakat Papua seperti Unrepresented Nations & Peoples Organization (UNPO), TAPOL (the Indonesian Human Rights Campaign), Forum Asia, West Papua Action Network (Westpan) dan masih banyak lagi.

Ketidakadilan mengganggu tujuan yang diinginkan dan dapat dicapai (Solomon & Theiss, 2022, p. 222) Keinginan masyarakat Papua adalah ingin kesejahteraan dan hidup yang layak yang mana belum sepenuhnya diperhatikan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia, sehingga munculah keinginan merdeka. Di Indonesia, masyarakat Papua memaknai merdeka ke dalam dua konsep yaitu bahwa yang pertama, merdeka adalah negara yang berdaulat. Lalu yang kedua adalah melindungi tanah Papua, alamnya, budaya dan identitas Papua, dan kebutuhan akan fasilitas kesehatan dan pendidikan (MacLeod, 2015, pp. 87–88). Pemaknaan yang kedua berlandaskan pada isu-isu sosial ekonomi yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat Papua.

Dalam wacana resmi negara, Gerakan Papua Merdeka diposisikan oleh pemerintah Indonesia sebagai gerakan separatistis dan ancaman terhadap kedaulatan nasional, bahkan secara sistematis dilabeli sebagai kelompok kriminal atau “gerombolan pengacau liar” guna menegaskan delegitimasi politiknya dan membenarkan pendekatan keamanan di Papua. Perspektif ini tidak hanya menolak keberadaan Gerakan Papua Merdeka sebagai aktor politik yang sah, tetapi juga meniadakan akar historis dan tuntutan penentuan nasib sendiri yang melatarbelakangi kemunculannya (Budiardjo & Liong, 1988). Pandangan negara tersebut kemudian membentuk persepsi dominan di masyarakat luas Indonesia, di mana FPM kerap dipahami secara sempit sebagai gerakan separatistis bersenjata yang mengancam persatuan nasional. Sebaliknya, dalam diskursus internasional dan kajian kritis dekolonisasi, FPM dipandang sebagai ekspresi perlawanan politik masyarakat Papua terhadap kolonialisme internal, kekerasan struktural, dan kegagalan proses penentuan nasib sendiri yang sah, dengan simbol-simbol seperti Bintang Kejora dimaknai sebagai representasi harapan, martabat dan perjuangan dekolonisasi, bukan semata tindakan makar terhadap negara (Webb-Gannon et al., 2021).

Bertolak dari pertentangan wacana tersebut, permasalahan utama yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana mahasiswa Papua memaknai Free Papua Movement (FPM) di tengah dominasi narasi resmi negara yang melabeli FPM sebagai gerakan separatistis dan ancaman keamanan, serta beredarnya diskursus alternatif yang memposisikannya sebagai ekspresi perlawanan politik dan perjuangan penentuan nasib sendiri. Mahasiswa Papua berada pada posisi sosial

yang unik karena mereka tidak hanya menjadi subjek dari kebijakan dan wacana negara, tetapi juga aktor yang secara langsung mengalami dampak historis, struktural, dan simbolik dari konflik Papua. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana pengalaman hidup, identitas kolektif, serta interaksi dengan wacana negara dan internasional membentuk pemaknaan mahasiswa Papua terhadap FPM, apakah sebagai gerakan kriminal, simbol perlawanan, identitas politik, atau sebagai representasi ketidakadilan struktural yang mereka rasakan.

Gambar I.1  
Kesenjangan Sosial Masyarakat Asli Papua Berjualan Di Depan Warung  
Masyarakat Non Papua



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Isu *Free Papua Movement* atau gerakan Papua Merdeka berakar dari berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, Belanda masih mempertahankan kontrol atas wilayah Papua Barat. Pada tahun 1961, Belanda mempersiapkan Papua Barat untuk kemerdekaan dengan membentuk Dewan Papua dan mengibarkan bendera Bintang Kejora, namun hal ini ditentang oleh Indonesia yang menganggap Papua Barat sebagai bagian integral dari wilayahnya. Ketegangan ini memuncak dan pada

akhirnya diselesaikan melalui Perjanjian New York (1962), yang menempatkan Papua Barat di bawah administrasi sementara PBB sebelum diserahkan kepada Indonesia pada tahun 1963. Sesuai perjanjian, Indonesia diwajibkan menyelenggarakan sebuah referendum yang dikenal sebagai "Penentuan Pendapat Rakyat" (Pepera) untuk menentukan masa depan wilayah tersebut.

Pepera yang diadakan pada tahun 1969 ini menuai banyak kontroversi. Daripada melibatkan seluruh rakyat Papua, Indonesia hanya memilih 1.025 perwakilan yang kemudian secara aklamasi memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Banyak pihak, termasuk PBB, mencatat adanya tekanan dan intimidasi yang kuat selama proses tersebut, yang kemudian menjadikan hasil referendum ini diragukan. Sejak saat itu, gerakan-gerakan perlawanan dan organisasi pembebasan, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), terus berjuang menuntut penentuan nasib sendiri yang sejati. Isu ini tetap hidup hingga kini karena adanya perbedaan pandangan, ketidakpuasan terhadap pembangunan, dugaan pelanggaran HAM, dan konflik yang berkelanjutan antara pihak keamanan Indonesia dan kelompok separatis, sehingga menyisakan pertanyaan tentang keadilan dan kedaulatan di wilayah tersebut.<sup>1</sup>

Dengan adanya wacana negara, Papua sering dipandang dengan stigma keterbelakangan oleh masyarakat Indonesia, padahal kondisi ini lebih banyak diproduksi oleh ketidakadilan struktural. Transmigrasi besar-besaran yang didorong pemerintah sejak era Orde Baru menjadi salah satu bentuk diskriminasi

---

<sup>1</sup> West Papua: The Obliteration of a People Carmel Budiardjo Liem Soei Liong

yang berdampak panjang. Tanah adat masyarakat Papua secara perlahan dikuasai oleh pendatang, sementara orang asli Papua tersisih dari ruang-ruang ekonomi dan sosial. Akibatnya, mereka mengalami peminggiran dalam akses tanah, pekerjaan, hingga partisipasi politik, sehingga menimbulkan rasa tidak memiliki di tanah sendiri.

Diskriminasi juga hadir melalui pendekatan keamanan yang menempatkan orang Papua sebagai ancaman. Militerisasi yang masif membuat Papua identik dengan wilayah konflik, di mana aparat sering melakukan kekerasan, intimidasi, bahkan pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil. Penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan di luar proses hukum kerap terjadi dengan dalih memberantas separatisme. Hal ini menciptakan trauma kolektif dan rasa ketidakamanan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari orang Papua. Perlakuan semacam ini semakin mempertegas bahwa mereka tidak diperlakukan setara sebagai warga negara yang memiliki hak perlindungan dan martabat yang sama di hadapan hukum.

Selain itu, diskriminasi juga tampak dalam dimensi sosial-budaya. Identitas, bahasa, dan kebudayaan Papua sering terpinggirkan karena hegemoni budaya dominan dari luar Papua. Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam tidak memperhatikan nilai-nilai lokal dan kearifan masyarakat Papua. Ketika tanah dan hutan adat dieksploitasi, masyarakat Papua tidak hanya kehilangan sumber penghidupan tetapi juga makna budaya yang melekat pada tanah tersebut. Inilah bentuk diskriminasi struktural yang membuat orang Papua mengalami alienasi, baik secara politik, ekonomi, maupun budaya,

yang kemudian memperkuat semangat emosional untuk memperjuangkan pengakuan dan kemerdekaan sebagai jalan untuk memperoleh martabat yang setara.

Tindakan diskriminasi yang terjadi bukan hanya secara umum pada masyarakat Papua namun juga terkhusus pada kelompok-kelompok tertentu, salah satunya ialah mahasiswa. Diskriminasi yang dialami mahasiswa Papua di berbagai daerah di Indonesia sering muncul dalam bentuk stigma dan stereotip negatif yang dilekatkan kepada identitas mereka sebagai orang Papua. Mahasiswa Papua kerap dipandang berbeda karena warna kulit, logat bahasa, serta atribut budaya mereka, sehingga menimbulkan perlakuan tidak adil dalam kehidupan sosial sehari-hari. Tidak jarang mereka menjadi sasaran ujaran rasis, baik di ruang publik maupun media sosial, yang menganggap orang Papua sebagai “pendatang” yang tidak seutuhnya bagian dari bangsa Indonesia. Kondisi ini menciptakan perasaan terasing, ketertekanan psikologis, dan hambatan untuk dapat mengekspresikan identitas mereka secara bebas di lingkungan akademik.

Selain diskriminasi sosial, mahasiswa Papua juga menghadapi perlakuan yang represif ketika menyuarakan aspirasi politik maupun keadilan sosial terkait isu Papua. Demonstrasi atau forum diskusi yang mereka adakan sering dicurigai sebagai tindakan separatis, sehingga berujung pada intimidasi, pengawasan ketat, hingga kriminalisasi oleh aparat. Alih-alih mendapatkan ruang akademik yang bebas dan kritis, mereka justru harus berhadapan dengan stigma “berbahaya” hanya karena mengangkat isu Papua. Situasi ini menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap mahasiswa Papua tidak hanya terbatas pada ranah sosial dan budaya, tetapi

juga terinstitusionalisasi melalui kebijakan keamanan yang membatasi kebebasan berekspresi dan hak untuk berorganisasi.

Dalam struktur sosial di masyarakat, kelompok menjadi salah satu komponennya. Mahasiswa menjadi bagian kecil dalam struktur tersebut baik secara individualitas maupun kelompok. Di beberapa kota besar di Indonesia seperti Surabaya, terdapat kelompok yang dinamakan Aliansi Mahasiswa Papua Surabaya (disesuaikan dengan kota tempat kelompok tersebut). Kelompok ini memiliki koneksi dengan aliansi mahasiswa di kota lainnya. Aliansi Mahasiswa Papua giat melakukan *group discussion*, demonstrasi, dan aktivitas lainnya untuk mengangkat isu-isu yang terjadi di Papua.

Pada tahun 2017, segerombolan mahasiswa Papua di Bali melakukan aksi demonstrasi terkait kemerdekaan Papua yang mana dinilai merupakan hak masyarakat Papua. Mereka menyatakan bahwa dalam Papuan People's Free Choice (Pepera) di tahun 1969, opini masyarakat Papua hanya diwakilkan oleh 175 orang dari 809,337 orang Papua yang mana dinilai tidak bisa mewakili perasaan masyarakat Papua pada saat itu. Dalam penyampaian pesan terkadang terjadi kontaminasi. Kontaminasi terjadi ketika pesan tercampur atau diberi label yang salah. (Mckay et al., 2009, p. 40). Dalam hal ini suara dan perasaan masyarakat Papua terkontaminasi oleh suara 175 orang yang dipilih sebagai perwakilan Pepera oleh Negara Indonesia yang mana dianggap memanipulasi suara masyarakat Papua.

Tidak hanya di Bali, di Jakarta pada 1 Desember 2023, demonstrasi juga dilakukan oleh kelompok Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua. Hal serupa dikumandangkan di depan kantor Kedutaan Besar



(Kedubes) Amerika Serikat dan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dikutip dari detiknews, dalam orasinya disampaikan bahwa Papua tidak punya hak dan harga diri di atas kedaulatan Indonesia. Dalam orasi-orasi seperti ini sering kali kita melihat emosi yang menggebu-gebu. Ada berbagai perasaan yang tercampur aduk. Dalam *Model Of Emotions*, ketika dua emosi atau beberapa emosi tercampur maka akan muncul emosi lainnya. Seperti emosi kemarahan mahasiswa Papua di Jakarta dan antisipasi atau pengharapan akan kemerdekaan yang kemudian menimbulkan emosi baru yaitu agresif (DeVito, n.d., p. 195).

Di Jawa Timur, khususnya di Surabaya demonstrasi juga pernah dilakukan oleh mahasiswa Papua setahun setelah adanya kasus rasisme yang terjadi pada mahasiswa Papua yang disebut oleh mahasiswa Papua sebagai Hari Kera pada 2019. Isu yang diangkat memanglah isu diskriminasi ras namun demikian, isu ini adalah salah satu dari banyaknya isu sosial yang menimpa masyarakat Papua yang mendorong mereka untuk meraih kemerdekaan. Beberapa aksi demonstrasi juga pernah dilakukan oleh kumpulan mahasiswa Papua di Surabaya. Seperti pada 1 Desember 2020, teriakan “Papua bukan merah putih melainkan bintang kejora” dilontarkan berulang-ulang dalam aksi demonstrasi peringatan hari deklarasi kemerdekaan Papua Barat.

Gerakan Papua Merdeka memiliki dampak besar pada mahasiswa dan generasi muda Papua karena mereka adalah pewaris langsung dari narasi sejarah yang kompleks, termasuk Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang kontroversial pada tahun 1969. Sebagai generasi yang tumbuh di era informasi, mereka memiliki akses terhadap berbagai perspektif, yang sering kali berbeda dari narasi resmi

pemerintah. Perbedaan ini menciptakan ketegangan emosional, di mana mereka harus menavigasi identitas pribadi dan kolektif mereka di tengah tuntutan sejarah dan tekanan sosial. Dengan adanya akses ke media sosial, mereka tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen konten yang secara aktif mengekspresikan, menegosiasikan, dan membangun makna kemerdekaan secara visual, menjadikannya isu yang terus hidup dan relevan bagi eksistensi mereka.

Berdasarkan teori Emotional Message dalam (Bartsch & Hübner, 2005), pengalaman mahasiswa Papua sebagai generasi muda yang dipengaruhi isu kemerdekaan dapat dianalisis melalui tiga tingkatan utama yaitu Pola Stimulus-Respons Bawaan, Skema Asosiatif, dan Negosiasi Simbolik. Teori ini memungkinkan untuk memahami bahwa ekspresi mereka bukanlah sekadar respons pribadi, melainkan bagian dari sebuah proses komunikasi yang kompleks dan berlapis, yang membentuk identitas emosional dan narasi kolektif mereka. Cerita yang kita jalani memberikan informasi atau data akan pengalaman hidup, tapi kita tidak pernah bisa menceritakan seluruh pengalaman, kita hanya dapat menceritakan sebagian kisah hidup kita pada waktu tertentu, dan cerita yang kita ceritakan membangun dunia makna dan tindakan yang dapat tercermin melalui emosi kita (Littlejohn & Foss, n.d., p. 934).

Di dalam penelitian ini, yang akan menjadi subjek penelitian adalah mahasiswa suku Papua asli dan/atau juga mahasiswa bukan suku Papua namun memiliki perasaan terikat dengan Papua. Sebagai contoh yang lahir dan besar di Papua atau memiliki pengalaman terlibat secara langsung dalam mendalami isu *Free Papua Movement*. Penelitian dengan menggunakan teori *emotional message*

akan berfokus pada komunikasi nonverbal dan verbal yang dilakukan oleh narasumber. Agar bisa mendapatkan data narasumber yang berkaitan dengan komunikasi nonverbal maka observasi akan dilakukan untuk mencermati komunikasi nonverbal yang dilakukan narasumber dalam proses wawancara seperti emosi yang dominan ditonjolkan atau adanya gabungan perasaan lainnya. Selama proses wawancara berlangsung, dokumentasi berbentuk video dan foto akan diambil sebagai bahan untuk mempelajari emosi raut wajah dan gerak tubuh subjek dalam memaparkan pengalaman dan pemaknaan. Dalam *emotional message*, terdapat empat komponen terkait *emotional experience* yaitu pertama, mempengaruhi; kedua, kesadaran akan struktur makna situasional dan/atau kognitif penilaian peristiwa; ketiga, keadaan kesiapan bertindak, yang didefinisikan sebagai kecenderungan yang dirasakan untuk menunjukkan atau menghambat perilaku; dan keempat, perubahan yang dirasakan pada tubuh, yang mencakup detak jantung, perubahan gairah, dan respons terhadap ekspresi wajah sendiri.

Hal-hal yang telah dipaparkan oleh peneliti merujuk pada satu inti pertanyaan bagaimana pemaknaan kemerdekaan dalam perspektif *emotional message* oleh mahasiswa Papua di Indonesia. Dengan berbagai persepsi yang bersifat negatif maupun positif, yang tersebar di masyarakat Indonesia terkait isu *Free Papua Movement*, kita harus mampu memahami akar permasalahan keinginan merdeka tanpa adanya diskriminasi ras dan membentuk stigma negatif yang makin memperburuk keadaan.

Berdasarkan pemaknaan *merdeka* sebagai simbol yang sarat dengan lapisan emosi, harapan dan imajinasi masa depan, perbedaan penggunaan istilah *Free Papua Movement* dan *Gerakan Papua Merdeka* tidak hanya terletak pada perbedaan bahasa, tetapi juga pada ruang wacana dan konstruksi makna yang menyertainya. Kata *merdeka* diposisikan memiliki kesetaraan makna yang sederhana dengan tiga istilah dalam bahasa Inggris, yaitu *free*, *independent*, dan *liberated* (Kirksey, 2012). Selain itu, Jakarta menyamakan tuntutan masyarakat Papua akan *merdeka* dengan makna kebebasan yang sempit sebagai “kemerdekaan” dalam arti *independence* dan hasrat untuk membentuk negara berdaulat (Webb-Gannon et al., 2021, p. 104).

Istilah *Gerakan Papua Merdeka* lebih banyak digunakan dalam konteks nasional dan formal, serta cenderung dilekatkan pada narasi politik negara yang menekankan aspek kedaulatan dan keamanan, sehingga memposisikan gerakan tersebut sebagai entitas politik yang bersifat tetap dan terdefinisi dan pernah dilarang penggunaannya pada masa pemerintahan orde baru (Gault-Williams, 1987). Sebaliknya, istilah *Free Papua Movement* hadir dalam diskursus internasional dan ruang komunikasi global sebagai simbol perjuangan yang lebih cair, terbuka dan emosional, yang merepresentasikan beragam impian kebebasan, harapan kolektif, serta pemaknaan lokal yang tidak tunggal terhadap konsep *merdeka*. Oleh karena itu, penelitian ini memilih menggunakan istilah *Free Papua Movement* dalam judul untuk menegaskan fokus kajian pada proses pemaknaan dan komunikasi emosional mahasiswa Papua, bukan pada penilaian normatif terhadap gerakan politik tertentu, melainkan pada bagaimana *Free Papua*

*Movement* dipahami, dirasakan dan dinegosiasikan dalam pengalaman komunikasi mereka di ruang komunitas mahasiswa dan media sosial.

Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Menurut Creswell, seperti yang dijelaskan dalam (Qomar, 2022, p. 79) fenomenologi bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan makna yang umum dari pengalaman hidup sekelompok individu terkait suatu konsep atau fenomena. Dalam penelitian ini, metode fenomenologi dipilih karena mampu mengungkap pengalaman emosional dan pemaknaan kemerdekaan oleh mahasiswa Papua secara mendalam, sehingga pemahaman mereka tentang kemerdekaan dapat dipahami secara utuh. Pendekatan ini sesuai dengan kerangka pesan emosional yang menekankan bahwa komunikasi tidak hanya sekadar pertukaran informasi, tetapi juga melibatkan ekspresi dan interaksi emosional. Dengan demikian, fenomenologi menjadi cara yang tepat untuk memahami esensi pengalaman subjektif dan pemaknaan mahasiswa Papua, terutama bagaimana emosi mereka terbentuk, dihayati dan dinyatakan dalam memaknai isu *Free Papua Movement*.

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti mendapatkan rujukan terkait penelitian terdahulu yang memiliki suatu persamaan baik dari segi metode, teori, objek, atau subjek. Penelitian fenomenologi tentu saja sebelumnya pernah dilakukan oleh puluhan peneliti di luar sana. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Moekahar (Moekahar & Amalia, 2021) yang mengangkat konstruksi identitas gay di media sosial Instagram dengan menggunakan metode fenomenologi. Penelitian lainnya yang menggunakan metode fenomenologi dengan

judul Studi Fenomenologi Tentang Komunikasi Antarpribadi Anggota Komunitas Anak Indigo Indonesia (Fauzan & Supratman, 2017) dan Studi Fenomenologi Keterbukaan Mengekspresikan Diri Kaum Gay Di Kota Medan Melalui Media Jejaring Sosial Facebook Sebagai Bentuk Eksistensi Diri (Sihombing & Sugianto, 2017)

Selain itu juga terdapat penelitian mengenai emosi manusia oleh Amalia Pranata (Pranata et al., n.d.) yang membahas keterbatasan ekspresi emosi melalui CMC atau computer mediated communication. Penelitiannya lainnya yang memiliki kesaamaan subjek dengan peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Ade Simanjuntak (Simanjuntak, 2015) dengan judul Hambatan Komunikasi Antara Polisi dengan Aliansi Mahasiswa Papua Surabaya.

Dengan adanya rujukan terdahulu yang membantu peneliti, diharapkan tujuan penelitian dapat tercapai. Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya peneliti menggunakan objek dan teori yang berbeda. Dalam penelitian ini akan membahas pemaknaan kemerdekaan dalam perspektif *emotional message*. Dalam studi komunikasi di Indonesia, teori *Emotional Message* dari Anne Bartsch dan Susanne Hübner (2005) masih tergolong baru dan belum menjadi teori arus utama. Banyak penelitian tentang emosi cenderung berfokus pada pendekatan yang lebih mapan, seperti kecerdasan emosional (*emotional intelligence*) atau pemasaran emosional (*emotional marketing*).

Banyak penelitian tentang emosi biasanya menggunakan kerangka kecerdasan emosional (*emotional intelligence*) atau pemasaran emosional (*emotional marketing*). Namun, dalam konteks penelitian mengenai pengalaman

dan pemaknaan mahasiswa Papua terhadap *Free Papua Movement*, pendekatan tersebut kurang tepat. Teori *Emotional Message* dipilih karena fokusnya tidak hanya pada kemampuan seseorang mengelola emosi, seperti dalam *emotional intelligence*, atau bagaimana emosi digunakan untuk tujuan komersial, seperti dalam *emotional marketing*, melainkan pada bagaimana emosi dihasilkan, dinyatakan, ditafsirkan, dan dipahami dalam konteks sosial, budaya, serta politik tertentu. Teori *Emotional Message* memberi ruang untuk meneliti dimensi pengalaman emosional yang bersifat kolektif dan kontekstual, misalnya bagaimana mahasiswa Papua menyampaikan perasaan marah, kecewa, harapan atau solidaritas ketika menanggapi isu kemerdekaan dan juga pemaknaan mereka terhadap kemerdekaan itu sendiri.

*Emotional Message* yang mereka sampaikan tidak hanya berkaitan dengan diri pribadi, tetapi juga terkait dengan identitas, sejarah, diskriminasi, serta hubungan kekuasaan yang dialami oleh masyarakat Papua. Dengan demikian, teori ini lebih tepat untuk menggali makna mendalam dari tiap ekspresi emosional dan mengapa emosi tersebut membentuk cara pandang mereka terhadap kemerdekaan. Selain itu, teori *Emotional Message* penting digunakan karena ia menekankan bahwa emosi memiliki pesan yang universal, namun pemaknaannya sangat dipengaruhi oleh budaya dan pengalaman hidup seseorang.

Hal ini sesuai dengan situasi mahasiswa Papua yang membawa identitas budaya dan pengalaman diskriminasi yang unik, sehingga emosi mereka tidak bisa dipahami hanya sebagai kemampuan individu seperti dalam *emotional intelligence*, atau sebagai strategi persuasi seperti dalam *emotional marketing*. Teori ini

memungkinkan peneliti menelusuri bagaimana emosi menjadi sarana komunikasi, perlawanan, atau solidaritas dalam konteks perjuangan politik dan sosial yang mereka alami dan bagaimana pengalaman tersebut membentuk pemaknaan mereka terhadap *Free Papua Movement*.

Teori *emotional message* sangat relevan untuk digunakan dalam membahas bagaimana mahasiswa Papua memaknai *Free Papua Movement*. Teori ini menekankan bahwa emosi bukan sekadar reaksi pribadi, tetapi juga bisa menjadi pesan yang membawa makna sosial dan budaya. Dalam konteks Papua, pengalaman sejarah, perlakuan tidak adil, dan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat menjadi sumber emosi yang bersifat kolektif. Emosi ini kemudian membentuk cara mahasiswa Papua memperhatikan dan memahami isu kemerdekaan. Dengan teori ini, peneliti bisa melihat bahwa emosi seperti marah, sedih, bangga, atau harapan bukan hanya perasaan pribadi, tetapi juga alat komunikasi yang menyampaikan sikap, identitas, dan harapan mereka terhadap kondisi sosial dan politik. Oleh karena itu, teori *emotional message* memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam memahami bagaimana mahasiswa Papua membangun pandangan dan pesan mereka mengenai kemerdekaan, dibandingkan teori lain yang lebih fokus pada aspek rasional atau kemampuan mengelola emosi secara individu.

Teori *Emotional Message* memberikan landasan konseptual yang relevan dalam memahami fenomena ekspresi mahasiswa Papua terhadap gerakan Papua Merdeka. Teori ini memandang emosi sebagai pesan sosial yang memiliki makna dan fungsi komunikasi. Dalam konteks penelitian ini, emosi yang ditampilkan mahasiswa Papua melalui aktivitas komunikasi di komunitas maupun media sosial



menjadi sarana untuk menyampaikan pengalaman, aspirasi, dan nilai-nilai yang mereka hayati sebagai bagian dari identitas Papua. Dengan demikian, teori ini membantu mengungkap bagaimana emosi berperan sebagai bentuk komunikasi yang menegaskan posisi mahasiswa Papua terhadap isu kemerdekaan, serta menjadi medium dalam mengekspresikan makna personal maupun kolektif terkait perjuangan dan identitas mereka.

Lebih jauh, teori *Emotional Message* memungkinkan peneliti menafsirkan bagaimana pesan emosional yang muncul dalam berbagai bentuk komunikasi—baik lisan, tulisan, maupun visual—membangun makna bersama di antara mahasiswa Papua. Emosi yang dikomunikasikan tersebut tidak hanya merefleksikan pengalaman subjektif, tetapi juga berfungsi memperkuat solidaritas dan narasi kolektif di ruang sosial dan digital. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat memahami bahwa ekspresi mahasiswa Papua mengenai kemerdekaan bukan sekadar ungkapan perasaan, melainkan bagian dari proses komunikasi yang membentuk kesadaran identitas, kebersamaan, serta pemaknaan baru terhadap *Free Papua Movement* dalam konteks sosial yang lebih luas.

Keterbaruan teori ini juga menjadi keunggulan karena dapat mengisi kekosongan dalam literatur komunikasi dengan menawarkan kerangka analisis yang unik. Teori ini sangat cocok untuk meneliti pengalaman emosional dan pemaknaan *Free Papua Movement* bagi mahasiswa Papua karena ia tidak hanya melihat emosi sebagai respons pribadi, tetapi juga sebagai sebuah proses komunikasi yang berlapis. Dengan menganalisis tiga tingkatan teori ini yaitu pola stimulus-respons bawaan, skema asosiatif, dan negosiasi simbolik. Penelitian ini

dapat secara mendalam mengungkap bagaimana pengalaman pribadi dan kolektif mahasiswa Papua membentuk pemahaman mereka tentang kemerdekaan, terutama di ruang digital seperti media sosial.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah penulis jabarkan, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Mahasiswa Papua memaknai *Free Papua Movement* dalam perspektif *emotional message*?

## **I.3 Batasan penelitian**

1. Subjek adalah mahasiswa Papua yang mana merupakan pelajar tingkat perguruan tinggi di Indonesia namun tidak diharuskan sebagai orang asli Papua namun bisa juga campuran atau memiliki orangtua asli Papua atau lahir dan besar di Papua. Klasifikasi batasan subjek penelitian ini didasarkan pada Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Orang Asli Papua Di Provinsi Papua Barat yang dikategorikan menjadi lima klasifikasi.
2. Fenomenologi adalah salah satu cara dalam melihat lebih jauh pemaknaan manusia terhadap suatu peristiwa yang menjadi bagian dari pengalaman hidup mereka.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

### **I.4.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam memahami fungsi emosi sebagai pesan sosial sebagaimana dijelaskan dalam *Emotional Message Theory*. Melalui penerapan teori ini,

penelitian memperluas kajian komunikasi yang berfokus pada konstruksi makna, ekspresi identitas, dan peran emosi dalam interaksi sosial, terutama pada konteks kelompok minoritas seperti mahasiswa Papua.

#### **I.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penerapan teori ini dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan sensitif terhadap konteks sosial-budaya Papua. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan, organisasi sosial, maupun media untuk merancang pendekatan komunikasi yang mendorong representasi yang lebih adil, empatik dan membangun terhadap masyarakat Papua. Peneliti berharap bahwa dengan adanya penelitian ini dapat membuka pandangan pembaca terhadap hasil penelitian ini bahwa setiap tindakan dibalik keinginan merdeka ada suatu pesan emosional yang ingin disampaikan.

#### **I.4.3 Manfaat Sosial**

Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan bagaimana komunikasi emosional mahasiswa Papua berperan dalam membangun solidaritas, memperkuat identitas kolektif, dan menciptakan ruang dialog yang lebih empatik antara masyarakat Papua dan non-Papua. Dengan demikian, hasil penelitian dapat meningkatkan pemahaman sosial terhadap dinamika emosi dan makna dalam isu *Free Papua Movement*.